

LAPORAN PENELITIAN BAHAN AJAR



TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(STUDI TENTANG SENGKETA PAJAK DAERAH)



UNIVERSITAS TERBUKA

Oleh
Suryarama
Agus Priyanto
Yudith A. Frans

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
2011





Lembar Pengesahan Penelitian Bahan Ajar

1. Judul Penelitian : Tindak Pidana Perpajakan (Studi Tentang Sengketa Pajak Daerah)
2. Bidang Kajian : Bahan Ajar
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Suryarama, SH, M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat, Golongan, NIP : Penata Tk. I Lektor III/d, 19580318 198510 1 001
 - d. Program Studi/Jurusan : Perpajakan/ Ilmu Administrasi
 - e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - f. Alamat rumah : Perumahan Pamulang Indah Blok D 10 No. 4 RT. 004/RW 011, Pamulang Timur, Tangerang Selatan 15417, Banten.
 - g. Nomor telepon/HP : 021-7423260 / 08128748277
 - h. E-mail : suryarama@mail.ut.ac.id
4. Nama Anggota Peneliti :
 1. Yudith A. Frans, S.Sos, MA
 2. Drs. Agus Priyanto, M. Si.
 3. Mahmudih (Tenaga Administrasi)
- 5
 - a. Periode Penelitian : 2011
 - b. Lama Penelitian : 8 (Delapan) bulan
6. Biaya Penelitian : **Rp. 20.000.000,-**
(Dua puluh juta rupiah)

Pondok Cabe, 27 Desember 2011



Mengetahui,
Dekan FISIP-UT

Daryono, SH, MA, Ph.D
NIP. 1951866185

Ketua Peneliti

Suryarama, SH, M.Hum
NIP. 19580318 198510 1 001

Mengetahui,
Ketua Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si
NIP. 195704221985032001



Menyetujui,
Ketua LPPM

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP. 196605081992031003



ABSTRAK

Tindak Pidana Perpajakan (Studi Tentang Pajak Daerah)

Oleh

Suryarama (suryarama@ut.ac.id)

Agus Priyanto (guspri@ut.a.id)

Yudith A. Frans (yudith@ut.ac.id)

Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997. Namun, dalam pelaksanaannya penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dengan demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan yang dapat menciptakan keadilan ditempuh melalui Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2002 yang dilakukan secara cepat. Objek hukum tindak pidana pajak adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengadilan pajak mengadili masalah yang berkaitan dengan besaran ketetapan pajak berupa sanksi administrasi. Adapun masalah pidananya diadili oleh Pengadilan Umum.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa pajak daerah yang diproses di pengadilan pajak, sengketa pajak daerah yang diselesaikan diluar pengadilan pajak, dan upaya melakukan banding dan kasasi atas sengketa pajak.

Objek pajak yang sering menimbulkan sengketa adalah pajak daerah terjadi karena menurut pemohon banding bahwa kain yang menutup kaca ruangan store dengan tujuan menghindari tembus pandang langsung dari luar (alasan *security*) dan sebagai pemanis dinding yang dianggap sebagai reklame adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan terminology yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2004. Sementara Majelis Banding tetap mempertahankan koreksi terbanding atas objek pajak reklame.

Jenis sengketa pajak daerah yang sering disengketakan dan sampai diajukan ke Pengadilan Pajak Jakarta yaitu koreksi atas jumlah pajak yang terutang, penetapan pajak keramaian, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor.

Tahap-tahap mengajukan banding dan kasasi atas sengketa pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu banding dan peninjauan kembali. Bila wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor ketetapan pajak tingkat I, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Bilaman ditemukan bukti-bukti baru yang memperkuat gugatan wajib pajak, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Key words: Pengadilan pajak, pajak daerah, kerugian negara,.



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Sejarah Peradilan Pajak	4
B. Pengertian Pajak	4
C. Tindak Pidana Perpajakan	5
D. Pemeriksaan Pajak	6
E. Ruang Lingkup Pemeriksaan	7
BAB III METODOLOGI	12
A. Rancangan Penelitian	12
B. Populasi dan Sampel	12
C. Teknik Pengumpulan Data	12
D. Rancangan Analisis Data	12
E. Instrumen Penelitian	13
BAB IV PEMBAHASAN	14
A. Sanksi Tindak Pidana Perpajakan	14
B. Pendapat Pakar	15
C. Contoh Kasus Pajak Daerah	16
D. Sengketa Perpajakan	18
E. Pelaksanaan Pengadilan Pajak	20
F. Banding dan Peninjauan Kembali	22
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	24
DAFTAR PUSTAKA	27

LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT Nomor 20928/UN31.2/PG/2011, 20 Oktober 2011
2. Ijin Penelitian dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT Nomor 20928a/UN31.2/PG/2011, 20 Oktober 2011
3. Surat tugas dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT Nomor 20928b/UN31.2/PG/2011, tanggal 20 Oktober 2011
4. Kuesioner Penelitian
5. Undang-Undang 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) yang dimaksud Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara karena hampir 80% penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini dilakukan oleh badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam UU Pengadilan Pajak ditentukan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan

hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Penjelasan UU Pengadilan Pajak)

Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undang-undang ini mengatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat pengadilan pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, proses penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam proses banding hanya diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50 % (lima puluh persen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak.

Pengadilan pajak bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
2. Sengketa yang diproses dalam pengadilan pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
3. Putusan pengadilan pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan pengadilan pajak, di samping jenis - jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, dapat juga jenis putusan berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten terdiri dari; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Objek pajak apa saja yang dapat menimbulkan sengketa perpajakan?
2. Jenis sengketa pajak daerah apa saja yang dapat diproses di pengadilan pajak?
3. Bagaimana tahap yang dilakukan untuk mengajukan banding dan kasasi sengketa pajak daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui objek hukum tindak pidana perpajakan yang diproses di pengadilan pajak.
2. Mengetahui jenis sengketa pajak daerah yang di proses pengadilan pajak.
3. Mengetahui prosedur dan tatacara mengajukan banding dan kasasi sengketa pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara akademik, dapat digunakan sebagai bahan revisi buku materi pokok Etika Bisnis Dalam Perpajakan (PAJA3347). Penelitian ini dilakukan sebagai pengayaan matakuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PAJA3345) pada modul 5 kegiatan belajar 3 yang membahas peran Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak daerah.
2. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran kepada institusi pengadilan pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Peradilan Pajak

Masalah pemungutan pajak oleh fiskus (aparatur pajak) dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus. Secara historis, penyelesaian sengketa pajak pada awalnya menjadi wewenang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Namun lembaga ini dianggap kurang memadai menyelesaikan sengketa pajak yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dibentuklah suatu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan. Kemudian terbitlah UU Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disingkat UU No.28 Tahun 2007).

B. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sendiri

sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh Negara di dunia. Selain sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pajak juga bermanfaat sebagai alat pemerataan pendapatan dan pendorong investasi. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak menyebabkan pajak masih dianggap sebagai suatu beban, sehingga seringkali ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak sering berupaya untuk menghindari pajak yang dikenakan kepadanya, hal ini tentunya merugikan Negara karena Negara akan kehilangan potensi pemasukan dari sektor pajak.

Kondisi ini membuat diperlukannya ketegasan terhadap wajib pajak dalam pemungutan pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Adanya kekuatan hukum mengikat dalam bentuk undang-undang menjadikan pajak memiliki sifat dasar dipaksakan yang berarti apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, maka dapat dikenai sanksi terhadapnya, bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan.

C. Tindak Pidana Perpajakan

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Berikut kutipan lengkapnya: Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Dalam hukum pajak, disamping sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hukum pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No.28 Tahun 2007. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Khusus untuk pemeriksa pajak adalah PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak yang diberi tugas wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.

D. Pemeriksaan Pajak

Sebelum wajib pajak terbukti telah melakukan kesalahan tidak dan/atau kurang membayar pajak, perlu dilakukan pemeriksaan. Menurut UU No.28 Tahun 2007, Pasal 1 angka 24, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut mengatur wajib pajak yang diperiksa (Pasal 29 ayat (3):

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Tujuan Pemeriksaan

Laporan terhutang hasil pemeriksaan disusun dalam suatu laporan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak secara ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan lapangan terhadap suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat wajib pajak, dan pemeriksaan kantor terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Proses Pemeriksaan dilakukan melalui;

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan terdapat pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mendefinisikan, Bukti Permulaan sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya

dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan kegiatan intelijen, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan.

Tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yaitu diusulkan dilakukannya penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), pembuatan laporan tindak pidana selain tindak pidana di bidang perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak yang berwenang, pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

“Bahan baku” Pemeriksaan Bukti Permulaan sebenarnya berasal dari usulan Kantor Pelayanan Pajak dan pengaduan masyarakat. Setidaknya inilah praktik yang terjadi saat ini. Tetapi tidak semua usulan dari Kantor Pelayanan Pajak diterima dan langsung diperiksa oleh Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Ada juga yang ditolak karena dianggap tidak layak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kalau di Bandung dan beberapa Kanwil, setiap pengusul harus melakukan pemaparan dihadapan tim pemeriksa Kanwil. Setelah itu, diputuskan diterima, atau ditunda dulu atau ditolak. Apabila dari bukti permulaan tidak menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan wajib pajak, maka secara otomatis kasus tersebut akan ditutup.

2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau kepala kantor wilayah DJP. Tetapi jika diperlukan, polisi dapat mendampingi atau membantu penyidik pajak. Terutama masalah pemberkasan, penyidik pajak kurang pengalaman karena sedikitnya kasus-kasus pidana pajak yang diajukan ke pengadilan negeri. Sedangkan bagi polisi, membuat berkas kasus pidana merupakan pekerjaan sehari-hari. Penyidik pajak tidak sebebas-bebasnya melakukan tugasnya, tetapi ia harus memberitahukan kepada jaksa penuntut umum bila memulai penyidikan dan wajib pula menyampaikan hasil/laporan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut umum yang akan menentukan apakah masalahnya sudah matang untuk diajukan ke pengadilan. Proses penyidikan mengandung dua klausul yakni: Penyidikan yang berakhir dengan diserahkannya hasil penyidikan ke pengadilan atau untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, hasil penyidikan tidak diproses di pengadilan/dihentikan, dengan catatan wajib pajak yang disidik telah melunasi utang pajaknya dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah hutang pajak.

3. Penyidik

Penyidik di bidang perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Wewenang Penyidik sebagaimana dikutip dari www.kanwilmalang.pajak.go.id yaitu;

1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. menghentikan penyidikan;
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
12. Penyidikan dihentikan dalam hal:
 - a. tidak cukup bukti;
 - b. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. peristiwanya telah daluwarsa;
 - d. tersangka meninggal dunia;

- e. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Pemungut.
- f. melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB III

METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pemrosesan informasi dan pengolahan data yang dilakukan dalam suatu analisa kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan *current status* subjek yang diteliti, dilakukan melalui metode survei untuk pengumpulan serta analisa datanya dan tanya jawab dengan wawancara (Indriantoro, dkk, 1999:27)

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mantan Ketua Pengadilan Pajak Jakarta dan pakar di bidang perpajakan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer berkaitan dengan tindak pidana perpajakan yang banyak menimbulkan sengketa pajak khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan mantan Ketua Pengadilan Pajak Jakarta dan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu data sekunder diperlukan untuk melihat gambaran umum masalah sengketa pajak daerah dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

D. Rancangan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu pertama-tama peneliti melakukan pengkajian data atau informasi secara menyeluruh sambil mengecek kembali keabsahan data dan kemudian membuat rangkuman dari hasil kuesioner dan wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ada dua yaitu kuesioner dan pedoman wawancara.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB IV PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh data mengenai sengketa pajak daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Adapun yang tergolong objek hukum tindak pidana pajak adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, diancam dengan hukuman pidana, sedangkan yang menjadi subjek hukum tindak pidana pajak adalah orang, badan, atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum pidana pajak dan terhadapnya dapat dijatuhi hukuman pidana.

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana pajak bila melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

A. Sanksi Tindak Pidana Perpajakan

1. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Namun mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana

di bidang perpajakan berubah menjadi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

B. Pendapat Pakar

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis telah menghubungi 2 (dua) orang pakar dibidang perpajakan yaitu mantan Ketua Pengadilan Pajak, Dr. Tjip Ismail, SH., M.B.A., M.M dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Suryohadi Djulianto, SH., M.M. Hasil wawancara dengan kedua pakar tersebut dituangkan dalam laporan berikut ini.

Menurut Tjip Ismail, tindak pidana perpajakan mengenal juga sanksi pidana, yang diatur dalam Pasal 38 Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni mengenai masalah “kealpaan” dan Pasal 39 KUHP mengenai masalah “kesengajaan”. Seharusnya ancaman pidana merupakan upaya terakhir, tidak boleh wajib pajak ketika salah “alpa atau sengaja” langsung ditindak pidana, karena pada dasarnya

pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (*self assessment*) untuk membayar hutang pajaknya. Sanksi pidana harus merupakan upaya terakhir agar membuat efek jera, namun tidak boleh juga semena-mena menjatuhkan pidana, sebab dalam pasal 38 UU No.28 Tahun 2007 wajib pajak ketika alpa/kelalaian, seperti wajib pajak tidak menyampaikan SPT yang benar, dan menyampaikan SPT tidak disertai lampiran maka sanksinya adalah kurungan atau denda, sedangkan yang sengaja dapat dipidana penjara dan denda. Untuk yang “alpa” ada alasan memaafkan, akan gugur jika wajib pajak membayar sanksinya (Pasal 8 Ayat 3). Baik masalah alpa ataupun sengaja dianggap menyebabkan kerugian Negara. Kerugian ini timbul karena sudah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

C. Contoh Kasus Pajak Daerah

Sebagai gambaran sengketa pajak daerah yang pernah di proses di Pengadilan Pajak seperti tabel di bawah ini;

Tahun	Pokok Sengketa	Nilai Yang di sengketakan
2000	Koreksi atas jumlah pajak yang terutang	Rp. 968.750.000,00,-
2004	Penetapan Pajak keramaian	Rp. 11.372.360,00,-
2007	Pajak Reklame	Rp. 4.596.000,00,-
2007	Pajak Kendaraan bermotor	Rp.18.200.000.000,00,-

Sumber: pengadilan pajak.com

Sengketa kasus pajak reklame sebagaimana tersebut di bawah ini;

- 1). Pemohon Banding : PT. ABC Retailment
 Jenis Pajak : Pajak Daerah dan Pajak Reklame
 Tahun Pajak : 2006
 Pokok Sengketa : Koreksi obyek Pajak Reklame sebesar Rp.4.596.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :

- a. bahwa koreksi dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- b. bahwa penyelenggaraan reklame sebagaimana peraturan tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, obyek pajak reklame termasuk reklame lain;

Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :

- a. bahwa kain yang menutup kaca ruangan store perusahaan Pemohon Banding tidak memiliki nilai/tujuan komersial karena tidak spesifik menunjuk suatu nilai barang dan atau jasa;
- b. Terbanding dengan menunjuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tidak tepat;
- c. bahwa kain yang menutup kaca ruangan store dengan tujuan menghindari tembus pandang langsung dari luar (alasan security) dan sebagai pemanis dinding belaka yang dianggap sebagai reklame adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan terminology yang diatur/dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 karena cetakan pada kain juga tidak digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau orang (tanpa penunjukkan pada suatu merk, logo atau lambing perusahaan), lebih-lebih logo dari perusahaan Pemohon Banding;

Menurut Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :

- a. bahwa obyek yang disengketakan tersebut merupakan penutup kaca yang dipasang oleh Pemohon Banding dan diputuskan sebagai obyek Pajak reklame oleh Terbanding;
- b. bahwa Terbanding mengartikan penutup kaca tersebut sebagai obyek reklame karena terdapat kata-kata *Double Deals, Double Sensations* dengan gambar dua orang laki-laki, hal tersebut sudah masuk dalam pengertian seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta penjelasannya;
- c. bahwa menurut Terbanding, kata-kata dan gambar yang ada dalam penutup kaca tersebut merupakan sebagian dari iklan dari produk Pemohon Banding;
- d. bahwa Pemohon Banding mengakui tujuan awal dari pemasangan penutup kaca yang terbuat dari kain adalah untuk menarik perhatian agar masuk ke toko Pemohon Banding, namun yang menjadi pokok sengketa permasalahan adalah mengenai tidak adanya Nama, Logo atau Simbol pada Kain yang menjadi sengketa;
- e. bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menunjukkan foto dari obyek yang dijadikan sengketa, dari foto tersebut dapat dilihat terdapat kata-kata dan gambar dari produk Pemohon Banding, yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- f. bahwa oleh karenanya berdasarkan penjelasan dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam sidang, Majelis bersepakat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas obyek Pajak reklame oleh Terbanding; (www.pengadilanpajak.com)

2). Contoh Pidana Perpajakan

Contoh pidana perpajakan yang diproses sampai pengadilan yaitu penyidikan terhadap Wajib Pajak PT. SAH yang dikendalikan oleh pengusaha AW dan ONW, karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak fiktif. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi, kepada Suara Pembaharuan di Jakarta (November 2011), mengatakan, proses hukum telah dilaksanakan atas kedua pengusaha tersebut dan telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong telah membacakan tuntutan pada tanggal 21 November 2011 untuk ONW dan pada 23 November 2011 untuk AW dengan tuntutan masing-masing 4 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan, karena keduanya diduga melanggar pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak diduga telah menggunakan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya pada tahun pajak 2001 dan 2003. Nilai kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 458 juta. Wajib Pajak tersebut merupakan pengguna faktur pajak dari penerbit faktur pajak yang telah disidik oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya dan terbukti bersalah berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.

D. Sengketa Perpajakan

Pengadilan pajak mengadili masalah yang berkaitan dengan besaran ketetapan pajak yaitu sanksi administrasi. Masalah pidananya adalah sanksi di Peradilan Umum. Sanksi administrasi, berupa besaran ketetapan pajak ditangani oleh peradilan pajak. Tetapi, bila ada indikasi korupsi, diadili oleh Pengadilan Tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak diatur secara khusus dalam UU No.28 Tahun 2007, dengan demikian tidak boleh dialihkan menjadi tindak pidana korupsi. Sebab tindak pidana korupsi ancaman hukumannya 20 tahun, sedangkan pidana perpajakan bila dilakukan "dengan sengaja" ancaman hukumannya paling tinggi 6 tahun.

Pengadilan pajak memiliki kewenangan untuk memutus perkara mengenai sengketa pajak. Menurut Pasal 1 butir 5 UU No 14 Th. 2002, menyebutkan pengertian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU No. 14 Th. 2002 dengan Surat Paksa. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Pengadilan pajak juga mempunyai kewenangan mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Ketua pengadilan pajak berwenang memanggil pihak ketiga untuk keperluan pemeriksaan. Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. Kekuasaan pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam UU No. 14 Th. 2002 ditentukan bahwa pengadilan pajak bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu berkaitan dengan:

1. Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan sidang pengadilan pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.

3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
4. Putusan pengadilan pajak memuat penetapan besarnya terutang dari wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibat jenis putusan pengadilan pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, yang berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, UU Nomor 14 Tahun 2002 mengatur pula hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan pengadilan pajak.

E. Pelaksanaan Pengadilan Pajak

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2002 menimbulkan kesan adanya dualisme bahwa seolah-olah pengadilan pajak berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, hal tersebut dapat ditepis karena UU Nomor 14 Tahun 2002 secara jelas menyatakan bahwa pengadilan pajak merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang pemeriksaan dan pemutusan sengketa di bidang perpajakan. Kasus sengketa pajak yang sampai pada tingkat kasasi menjadi kompetensi dari Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa, "Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan pajak yang berkedudukan di ibukota Negara," maka pengadilan pajak hanya ada di ibukota Jakarta. Sama halnya dengan *Tax Court* di Amerika Serikat, yang hanya berkedudukan di Washington D.C. sebagai ibukota negara tersebut. Hal ini berlaku pula di lembaga peradilan pajak di negara-negara lainnya. Oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat pengadilan pajak adalah tidak harus *in persona* (para pihak harus dihadirkan) karena dalam pengadilan pajak yang diperiksa hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan, rekening bank, data transaksi, mengenai omzet, dan sebagainya. Kedudukan pengadilan pajak yang hanya bertempat di Jakarta

tidak menjadi penghalang bagi para wajib pajak dan fiskus yang berdomisili di luar Jakarta dan luar pulau Jawa untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak masing-masing. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi, "Sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukan dan apabila perlu dapat dilakukan di tempat lain." Sementara tempat sidang ditetapkan oleh ketua pengadilan pajak. Dengan demikian, sebagai contoh, bagi wajib pajak dan fiskus yang bersengketa di Makassar, Majelis Sidang Pengadilan Pajak dapat bersidang di kota tersebut.

Meskipun demikian pelaksanaan pengadilan pajak belum sepenuhnya berjalan lancar, karena pada September 2004, seorang pengusaha mengajukan permohonan uji materiil atau *judicial review* atas UU Nomor 14 Tahun 2002 kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon merasa dirugikan oleh beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dan beberapa pasalnya ia anggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memutuskan bahwa UU Nomor 14 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik secara materiil maupun formil pembentukannya, sehingga undang-undang ini tetap berkuatan hukum mengikat. Putusan tentang ditolaknya permohonan uji materiil atas undang-undang pengadilan pajak disertai rekomendasi yang tertuang dalam *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari tiga orang hakim konstitusi yang menyatakan bahwa UU Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945. tiga dari sembilan hakim konstitusi tersebut, menyatakan bahwa "Pengawasan terhadap hakim-hakim pengadilan pajak belum berjalan,"

Berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, menurut Dr. Lodewijk Gultom dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 melanggar asas praduga tak bersalah. Pasal tersebut menentukan wajib pajak yang ingin mengajukan banding diharuskan terlebih dahulu membayar 50 persen dari jumlah pajak terutang. Kewajiban ini seolah-olah mengesankan bahwa wajib pajak sudah bersalah atau mengakui kesalahannya. Selain itu, menurutnya, pengadilan pajak merupakan bentuk penggabungan kekuasaan

yudikatif di bawah legislatif. Ia berpendapat bahwa UU Nomor 14 Tahun 2002 memuat materi yang melegitimasi kekuasaan pemerintahan terhadap warga negara. Oleh karena itu, perlu ada kontrol atau pengawasan dari legislatif dan yudikatif terhadap pengadilan pajak. Hakim-hakim pengadilan pajak belum diawasi secara baik sehingga warga negara selaku wajib pajak sering dikorbankan. Sebaiknya, ketergantungan hakim-hakim tersebut pada Menteri Keuangan harus diputus agar dapat independen dalam memutus sengketa pajak.

F. Banding dan Peninjauan Kembali

Sengketa pajak adalah sengketa publik dan masuk dalam ranah administrasi publik. Sengketa tersebut berkaitan dengan besaran ketetapan pajak, keberatan ditujukan ke kantor ketetapan pajak tingkat I. Apabila wajib pajak tidak puas dengan ketetapan ini boleh mengajukan banding ke pengadilan pajak. Di pengadilan pajak akan dicek sehingga hasilnya bisa *fair*. Jika ada bukti baru bisa diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Banding

Proses penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus selain bisa diselesaikan di tingkat internal Direktorat Jenderal Pajak, ada juga proses penyelesaian di luar Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, penyelesaian di tingkat eksternal ini bukan merupakan alternatif dari penyelesaian di tingkat internal tetapi lebih pada proses yang berkelanjutan apabila proses di tingkat internal mengalami jalan buntu.

Penetapan, Keberatan, Banding dan Peninjauan kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka wajib

pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Keberatan

Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu penetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat penetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Syarat pengajuan keberatan adalah :

Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas; (UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 15, 16, 17, dan 18)

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat penetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yaitu surat penetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yaitu surat penetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yaitu surat penetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,

serta pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

1. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
2. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Peninjauan Kembali (PK)

Apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Permohonan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.



BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan tindak pidana perpajakan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Objek pajak yang sering menimbulkan sengketa adalah pajak daerah. Sengketa itu terjadi karena menurut pemohon banding bahwa kain yang menutup kaca ruangan store dengan tujuan menghindari tembus pandang langsung dari luar (alasan *security*) dan sebagai pemanis dinding yang dianggap sebagai reklame adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan terminology yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2004. Sementara Majelis Banding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi terbanding atas objek pajak reklame.
2. Jenis sengketa pajak daerah yang sering disengketakan dan sampai diajukan ke Pengadilan Pajak Jakarta yaitu koreksi atas jumlah pajak yang terutang, penetapan pajak keramaian, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor.
3. Tahap-tahap mengajukan banding dan kasasi atas sengketa pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu banding dan peninjauan kembali. Bila wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor ketetapan pajak tingkat I, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Bilaman ditemukan bukti-bukti baru yang memperkuat gugatan wajib pajak, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Rekomendasi

1. Hasil penelitian bahan ajar ini patut dipertimbangkan untuk digunakan sebagai masukan pada revisi matakuliah pajak daerah dan retribusi daerah (PAJA3345) dimasa mendatang.
2. Berhubung sengketa pajak daerah dan retribusi daerah cakupannya sangat luas, maka setiap pokok bahasan dalam setiap modul yang akan direvisi disertakan pula

contoh-contoh yang yang terjadi dalam praktik peradilan pajak, sehingga para mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif,

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku;

Agustian, Widi, *Okezone, 2010 Tindak Pidana Perpajakan Mengandung Pidana Lain*
Jun Cai, Jun dan Tobing, Amalia, Baltyra. Com, 2010, *Tindak Pidana Perpajakan oleh wajib pajak*

Harian Suara Pembaharuan, November 2011

Pandiangan, Liberty, 2002, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Waluyo, Bambang, 1991, *Pemeriksaan dan Peradilan Dibidang Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuda, Shaelendra Prabu, 2008, *Penyelesaian sengketa pajak Berdasarkan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak*, . Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Koran:

Suara Pembaharuan, November 2011

Internet:

www.kanwil.malang.pajak.go.id



LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 20928 /UN31.2/PG/2011

20 OCT 2011

Lamp. :

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 40-42

Jakarta 12190

Sehubungan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh:

No.	Nama	NIP	Pekerjaan
1.	Suryama: SH, M.Hum	19580318 1985101001	Dosen
2.	Drs. Agus Priyanto, M.Si	19670524 2000031001	Dosen

Dengan ini kami mohon agar yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan penelitian tentang **Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (studi Kasus Pada Pengadilan Pajak Jakarta)**. Penelitian tersebut akan dilakukan pada pertengahan bulan Oktober sampai November 2011.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Dekan FISIP-UT
2. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 20928a/UN31.2/PG/2011

20 OCT 2011

Lamp. :

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Sekretaris Pengadilan Pajak Jakarta

Gedung Sutikno Slamet, Kementerian Keuangan

Jl. Wahidin

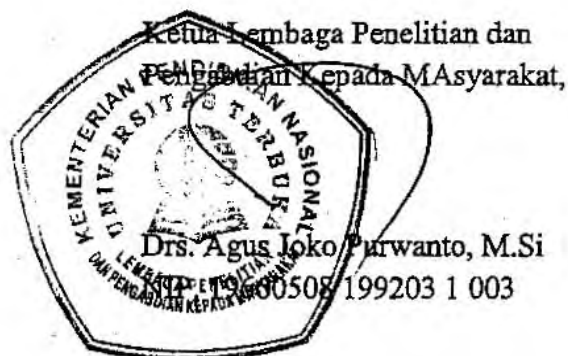
Jakarta 10710

Sehubungan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh:

No.	Nama	NIP	Pekerjaan
1.	Suryaman, SH, M.Hum	19580318 1985101001	Dosen
2.	Drs. Agus Priyanto, M.Si	19670524 2000031001	Dosen

Dengan ini kami mohon agar yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan penelitian tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (studi Kasus Pada Pengadilan Pajak Jakarta) Penelitian tersebut akan dilakukan pada pertengahan bulan Oktober sampai November 2011.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Dekan FISIP-UT
2. Yang bersangkutan

SURAT TUGAS

Nomor: 20318 E / UN31.2/PG/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP : 19660508 199203 1 003
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Menugaskan kepada :

1. Nama : Suryarama, SH, M.Hum.
NIP : 19580318 198510 1001
Jabatan Penelitian : Ketua Penelitian
Alamat : FISIP Universitas Terbuka, Jl.Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat
Telepon : 021-7490941 ext. 19028 Fax 021-7434391
2. Nama : Drs. Agus Priyanto, M.Si.
NIP : 19670524 200003 1001
Jabatan Penelitian : Anggota
Alamat : FISIP Universitas Terbuka, Jl.Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat
Telepon : 021-7490941 ext. 1928 Fax 021-7434391

untuk melakukan penelitian tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Kasus pada Pengadilan Pajak Jakarta) yang akan dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan Oktober sampai dengan pertengahan bulan Nopember 2011

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 20 OCT 2011

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP. 19660508 199203 1 003

Tembusan Yth :

1. Dekan FISIP-UT
2. Yang bersangkutan.



Kuesioner Penelitian Pajak (Tindak Pidana di Bidang Perpajakan)

- A. Objek pajak yang dapat menimbulkan sengketa perpajakan.
1. Jenis tindak pidana perpajakan apa saja yang sering menimbulkan sengketa perpajakan?
 2. Apakah sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak?
 3. Bila wajib pajak keberatan dengan keputusan yang dijatuhkan pengadilan pajak, kemana wajib pajak mengajukan keberatan?
 4. Sebutkan jenis hukuman dalam perpajakan?
 5. Bila wajib pajak telah melunasi hutang-hutang pajaknya, apakah tuntutan pidana terhadapnya menjadi gugur?
- B. Jenis sengketa pajak daerah yang diproses melalui pengadilan pajak
1. Apakah setiap sengketa pajak selalu diproses ke pengadilan pajak?
 2. Jenis-jenis sengketa apa saja yang tidak perlu diproses sampai pengadilan pajak
 3. Berapa jumlah sengketa perpajakan yang diproses pengadilan pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir?
- C. Tahap melakukan banding dan kasasi sengketa pajak daerah.
1. Sengketa pajak apa saja yang dapat diselesaikan diluar pengadilan pajak?
 2. Apa kriteria sengketa pajak yang dapat diselesaikan diluar pengadilan?
 3. Bila sengketa pajak telah diselesaikan diluar pengadilan, apakah kewajiban wajib pajak menjadi gugur?

Jakarta, 2 November 2011

Tim Peneliti

1. Suryarama
2. Agus Priyanto
3. Yudith A. Frans

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

imbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;
- c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;
- d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
- e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, tersebut diatas perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Pajak;

ingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan.
4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon banding.

9. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.
10. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.
11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
13. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
14. Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.
15. Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
16. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
17. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dari Sekretaris Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak.
18. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.
19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak dan penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 3

Undang-undang ini dibentuk Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibukota Negara.

Pasal 4

Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain.

Tempat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 5

Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan Sengketa Pajak.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN PAJAK

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera.

Pasal 7

Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua.

Bagian Kedua Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 8

Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
- f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
- g. berwibawa, jujur, dan kerkelakuan tidak tercela;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.

Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf b dan huruf f.

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.

Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut :

'Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya

Ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan Ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Pajak yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."

Ketua dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Hakim mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pasal 12

Hakim tidak boleh merangkap menjadi :

- a. pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
- b. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
- c. penasehat hukum;
- d. konsultan Pajak;
- e. akuntan publik; dan/atau
- f. pengusaha.

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia, dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan :

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

Pasal 15

Usul pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Bagian Ketiga Majelis Kehormatan Hakim

Pasal 16

Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.

Majelis Kehormatan Hakim bertugas :

1. meneliti dan meminta keterangan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang diusulkan untuk :
 - a. diberhentikan dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
2. mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau hakim karena diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri.

Pasal 18

Jika terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dikeluarkan surat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara terlebih dahulu dari jabatannya.

Jika Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa penahanan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 19

Jika dalam pemeriksaan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang telah ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ternyata tidak terbukti melakukan tindak

pidana, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.

Apabila tuntutan pidana terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.

Pasal 20

Ketua, Wakil Ketua atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus sudah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 21

aturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Protokoler dan Tunjangan

Pasal 22

Tedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan Pemerintah.

tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti

Pasal 23

etaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, ntu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 24

lum memangku jabatan, Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti wajib diambil sumpah janji oleh Ketua menurut agama atau kepercayaannya yang berbunyi sebagai berikut : Saya mpah/berjanji :

wa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti akan setia dan sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan Pemerintah";

wa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ; kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung p";

wa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat taris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan a daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan";

wa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus rahasiakan";

wa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Pasal 25

Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. berijazah Sarjana Hukum dan sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan.

Pasal 27

Urutan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

Tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Struktur kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Urutan tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Ketujuh Panitera

Pasal 29

Untuk Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Keecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti tidak boleh merangkap menjadi :

- a. pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
- b. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
- c. penasehat hukum;
- d. konsultan Pajak;
- e. akuntan publik; dan/atau
- f. pengusaha.

Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri.

Pembinaan teknis Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 30

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti harus bersumpah berjanji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut: "Saya sumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, sungguh atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun";

ya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian";

ya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia";

ya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, sama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya, bagi seorang Panitera, Wakil Panitera dan Penerima Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

BAB III KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 31

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 32

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Pasal 33

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Pertama Kuasa Hukum

Pasal 34

Pihak-pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pengawal, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

**Bagian Kedua
Banding
Pasal 35**

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

Pasal 36

Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 5; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 37

Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding alit.

Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 38

Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 39

Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan :

- a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
- b. putusan Majelis Hakim Tingkat pertama melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan

- b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketiga Gugatan

Pasal 40

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

Angka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari dihitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat gugatan.

Pasal 41

Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat palit.

Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 42

Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan

- a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang
- b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.

Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 43

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.

Bagian Keempat Persiapan Persidangan

Pasal 44

Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.

Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Pasal 45

Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu :

- a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
- b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.

Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.

Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.

Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.

Pasal 46

Pemohon Banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam sidang guna memberikan keterangan lisan.

Pasal 47

Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim atau Hakim Tunggal untuk

memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak.

Majelis atau Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.

Pasal 48

Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.

Dalam hal Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.

Bagian Kelima Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pasal 49

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.

Pasal 50

Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.

Pabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Pasal 51

Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim atau Panitera pada sidang yang sama.

Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon Banding atau penggugat atau kuasa hukum.

Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan/atau Panitera yang berbeda.

Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.

Pasal 52

Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti wajib

mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang ditanganinya.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa.

Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.

Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.

Pasal 53

Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan.

Dalam hal pemohon Banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon Banding atau penggugat.

Pasal 54

Hakim Ketua menjelaskan masalah yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Jawaban.

Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

Pasal 55

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.

Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.

Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.

Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

Atas perintah Hakim Ketua, saksi wajib datang ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan.

biaya untuk menghadirkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 56

Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.

Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan.

Pasal 57

Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah :

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
- c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Orang sakit ingatan.

Jika dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk didengar keterangannya.

Pasal 58

Yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat menolak permintaan Hakim Ketua untuk memberikan keterangan.

Pasal 59

Orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud tidak berlaku.

Pasal 60

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.

Jika pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 61

Jika pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk alih bahasa.

Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon banding atau penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan.

Yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa dimaksud.

Pasal 62

1 Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.

Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaanya.

Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Pasal 63

Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

Pasal 64

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.

Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat.

Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

Bagian Keenam Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pasal 65

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 66

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap :

- a. Sengketa Pajak tertentu;
- b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
- c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
- d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1) dan ayat (2). Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4). Pasal 37 ayat (1). Pasal 40 ayat (1) dan/ atau ayat

Pasal 67

peninjauan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.

Pasal 68

Atas ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat.

Bagian Ketujuh Pembuktian

Pasal 69

Alat bukti dapat berupa :

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.

Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 70

Alat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :

1. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
2. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
3. surat keputusan atau surat penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

Pasal 71

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Orang yang tidak boleh dianggap sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak boleh memberikan keterangan ahli.

Pasal 72

Pada permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.

Orang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Pasal 73

terangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang lami, atau didengar sendiri oleh saksi.

Pasal 74

Gugatan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 75

Getahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan cukup sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1).

Bagian Kedelapan Putusan

Pasal 77

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 79

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Apabila Majelis tidak dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Pasal 80

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar; d. tidak dapat diterima;
- d. membatalkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- e. membatalkan,

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi.

Pasal 81

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.

Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

Pasal 82

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :

- a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
- b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.

Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima,

Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.

Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Pasal 83

Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 84

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
- c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
- d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
- e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam

- persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. pokok sengketa;
- h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. amar putusan tentang sengketa; dan
- j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tidak diperlukan dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf C, huruf d, Pasal 66 ayat (2).

Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera.

Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.

Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.

Pasal 85

Pada setiap pemeriksaan I Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.

Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita Acara Sidang.

Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Putusan

Pasal 86

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87

Bila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 88

Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan selesai diucapkan.

Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawalan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 89

Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 90

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Pasal 93

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan :

- a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

1a saat Undang-undang ini mulai berlaku :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, menjadi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.
2. Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
4. Sekretaris Sidang pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Panitera pada Pengadilan Pajak.
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatannya.
6. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi, tugas dan wewenangnya disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 95

Banding atau Gugatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan belum diputus, dalam hal:

- a. Tenggang waktu pengajuan Banding Gugatannya telah berakhir sebelum berlakunya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997;
- b. tenggang waktu pengajuan Banding Gugatannya belum berakhir pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang ini;

Perkara Sengketa Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat diajukan peninjauan kembali berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

1a saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2684) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Pengadilan Pajak.

Pasal 98

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1a setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan memuatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

ndangkan di Jakarta
la tanggal 12 April 2002
(RETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

MBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG
PENGADILAN PAJAK

UMUM

aksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan
timbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya
sgketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan
tegis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan
jang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang
ikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian sengketa
ak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-
lang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam
aksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang
at menimbulkan ketidakadilan.

yelesaian sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat,
rah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan
wa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
kipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
injauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan
ngurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilalan terhadap kedua aspek pemeriksaan
g meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa
pajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

ses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh
ena itu dalam Undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan
ak maupun di tingkat Mahkamah Agung.

ain itu, proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran
anding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan
kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas.
am hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, penyelesaian sengketa
pajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50% (lima puluh
sen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa
pajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak. Pengadilan Pajak
g diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan
gketa perpajakan yaitu:

1. Sidang peradilan Pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu
dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat

dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan putusan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara sendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.

SAL DEND

al 1

cup jelas

al 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

UNIVERSITAS TERBUKA